**GAGASAN PENGATURAN SANKSI PIDANA KEIMIGRASIAN
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN MANUSIA**

Oleh : Limonang

Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH.,MH

Pembimbing II: Ferawati, SH.,MH

Alamat : Jl. Teuku Bey, Pekanbaru

Email / Telepon : limonang696@gmail.com / 0812-6130-3273

ABSTRACT

People smuggling as organized crime has been discussed in the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime or the UN Convention against Organized Transnational Crimes was finally ratified through Law Number 5 of 2009 in order to strengthen international cooperation and be increased in order to prevent and eradicate transnational organized crime. In the process, people who want to be smuggled migrant victims usually give a smuggler reward. In other words, people who are smuggled do their actions consciously and know the consequences of their actions. The modus operandi of human smuggling is inseparable from problems of demand (demand) and supply (payment). The smugglers will facilitate those who can afford to pay, then find an intermediary then the ship's captain and the person who will make fake documents if needed.

This type of research can be classified in the type of Normative legal research, which reveals legislation relating to legal theories that are the object of research. The approach taken uses a qualitative analysis approach by looking for data both in books, journals and other scientific works related to this research. The data sources used are primary and secondary legal materials.

The conclusions that can be obtained from the results of the study are: First, the Legal Arrangement of Human Trafficking Crimes According to Law Number 6 Year 2011 concerning Immigration has been regulated in general but in the norms the Immigration Act does not clearly explain the position of victims as perpetrators and regarding the crime of human smuggling is only explained in general terms. Second, the Ideal Immigration Criminal Sanction Arrangement Against Victims of Human Trafficking in Indonesia already has immigration rules but there is no specific article or special section governing human smuggling, the purpose of this special regulation is because the criminal acts of smuggling are different from acts of smuggling criminal immigration because it has a broad offense element and a concrete definition.

Keywords: People Smuggling, Crime, Victim, Immigration, Rules.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa berlakunya hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹

Wilayah Negara Republik Indonesia memiliki karakteristik luas secara geografi dikelilingi oleh perairan. Suryo Sakti Hadiwijoyo menjelaskan bahwa perbatasan negara yang merupakan pengaruh dari karakteristik wilayah negara yang memiliki perbatasan laut, terutama akan tampak dalam bidang perniagaan perdagangan maupun keamanan dan pertahanan wilayah.²

Penyebab dan latarbelakang terjadinya penyelundupan manusia tidak terlepas dari kondisi, tatanan, bahkan sistem nilai yang dianggap tidak memungkinkan berkembangnya potensi dan harapan manusia di tanah airnya. Berbagai tekanan dalam masalah kependudukan, masalah ketimpangan strategi atau tidak meratanya pembagian kesempatan dan pembangunan sosial-ekonomi, ataupun terjadinya berbagai konflik dengan alasan yang beranekaragam, telah lama dipahami sebagai pemicu terjadinya arus migrasi yang tidak sah.³

Penyelundupan manusia sebagai kejahatan terorganisir telah dibahas dalam *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* atau Konvensi PBB melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir akhirnya disahkan melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 guna untuk memperkuat kerjasama internasional dan ditingkatkan agar dapat mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi.⁴

Tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan orang memiliki persamaan dalam aspek hukum, yaitu proses, cara dan tujuan; yang mana tiga aspek tersebut memerlukan pembuktian hukum. Perbedaan dalam istilah penyelundupan manusia secara garis besar merujuk tindakan memasukkan warga negara asing ke negara tujuan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan keimigrasian.⁵

Dalam prosesnya tersebut, orang yang ingin menjadi korban diselundupkan (*smuggled migrant*) biasanya memberi imbalan kepada pihak penyelundup (*smuggler*). Dengan kata lain orang yang diselundupkan melakukan perbuatannya dengan sadar dan mengetahui konsekuensi perbuatannya. Modus operandi penyelundupan manusia tidak terlepas dengan masalah *demand* (permintaan) dan *supply* (pembayaran). Para penyelundup akan memfasilitasi mereka yang mampu membayar, kemudian mencarikan perantara lalu nahkoda kapal serta orang yang akan membuatkan dokumen palsu jika diperlukan.

Ahli hukum pidana internasional yaitu Kadarudin dalam jurnalnya bahwa

¹Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 6.

²Evelyn Martha Julianty, Dahlan Ali, Mujibussalim, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penyelundupan Manusia di Indonesia*, dalam jurnal ilmu hukum pasca sarjana universitas syah kuala, Vol. 2 No. 2 (2014), hlm. 41

³Natalis Pigay, *Migrasi Tenaga Kerja Internasional (Sejarah, Fenomena, Masalah dan*

Solusinya), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 2005, hlm.5.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

⁵<https://www.kompasiana.com/penyelundupan-manusia-dan-perdagangan-orang-apa-bedanya>, diakses tanggal 26 Agustus 2019.

penyelundupan manusia mengakibatkan semakin banyaknya jumlah imigran ilegal. Alasan yang kerap kali diberikan oleh para imigran yang diselundupkan adalah untuk mendapatkan pekerjaan atau memperbaiki status ekonomi, harapan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik, dan rasa aman dari konflik di negaranya. Maka dari itu mereka hanya bisa dikenakan Undang-Undang Keimigrasian bukan Perdagangan Orang karena substansi yang berbeda.⁶

Tabel I.1
Jumlah Korban Tindak Pidana
Penyelundupan Manusia
Periode 2015-2019 di Indonesia⁷

No.	Tahun	Jumlah Korban (Imigran Gelap)
1.	2015	4.426 orang
2.	2016	3.112 orang
3.	2017	13.840 orang
4.	2018	2.945 orang
5.	2019	2.996 orang
Jumlah		27.319 orang

Sumber : UNHCR Indonesia

Data serupa juga dikeluarkan oleh Satgas Pusat *People Smuggling* Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia dengan Sistem Manajemen Kasus Cerdas (CMIS) Unit Biro Investigasi Kriminal, penanganan penyelundupan manusia di Indonesia, Mabes Polri (yang

selanjutnya akan disebut Bareskrim Polri) pada tahun 2019 sebagai berikut:⁸

Dari tabel diatas, bahwa tindak pidana penyeludupan manusia ini, tidak bisa dipandang sebelah mata. Tindak pidana penyelundupan manusia sangat merugikan negara, karena Tenaga Kerja Indonesia merupakan salah satu penyumbang devisa negara. Jika para TKI diselundupkan maka negara tidak akan dapat devisa. Pelaku menjalankan aktivitas penyeludupannya ke negara asing dengan cara melalui jalur laut dan dengan dokumen yang telah dipalsukan. Kebanyakan dari korban ini adalah para TKI ilegal yang ingin bekerja ke Malaysia yang disebut dengan imigran gelap merupakan seseorang atau sekelompok orang yang memasuki wilayah suatu negara pada waktu dan tempat yang salah, tanpa melalui pemeriksaan petugas, mendapatkan izin masuk secara ilegal, atau melalui cara-cara lainnya yang bertujuan untuk menghindari keberlakuan ketentuan di bidang imigrasi.

Seperti yang kita ketahui, penyelundupan manusia bisa terjadi karena adanya kesepakatan antara pelaku dan korban untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia. Maka dari itu perlu adanya pengaturan sanksi pidana yang diberikan kepada korban agar menimbulkan efek jera dan juga untuk meminimalisir terulangnya kasus serupa. Menurut penulis dalam penegakan hukum tindak pidana penyeludupan manusia ini, diperlukan kesadaran juga dari pihak korban, bahwa untuk pergi ke negara lain, harus disertai dengan dokumen yang lengkap dan untuk membahas itu semua penulis akan tuangkan dalam sebuah karya

⁶Kadarudin, 2013, "People Smuggling dalam Perspektif Hukum Internasional dan Penegakan Hukumnya di Indonesia", *Jurnal Perpustakaan, Informasi, dan Komputer "Jupiter"* Volume XII Nomor 2 Edisi Juni.

⁷ <https://www.unhcr.org/id/>, diakses tanggal 26 Januari 2020.

⁸Sumber: Case Management Intelligent System (CMIS) PS the Unit of Criminal Investigation Bureau, Indonesia Police Headquarters. *Penanganan Penyelundupan Manusia di Indonesia. The Handling of People Smuggling in Indonesia.* 2019.

ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Gagasan Pengaturan Sanksi Pidana Keimigrasian Terhadap Korban Tindak Pidana Penyelundupan Manusia.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penyelundupan manusia dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana yang ideal terhadap korban tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penyelundupan manusia dalam hukum positif Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana yang ideal terhadap korban tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan.
- b. Sebagai referensi bagi para peneliti berikutnya.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran penulis.

D. Kerangka Teori

1. Asas Legalitas

Didalam hukum Romawi kuno yang menggunakan bahasa latin, tidak dikenal apa yang disebut asas legalitas. Pada saat itu dikenal dengan kejahatan yang disebut *Criminal Extra Ordinaria*, yang berarti “kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang” diantara *Criminal Extra Ordinaria* ini yang terkenal adalah *criminal stellionatus* (perbuatan durjana atau jahat).⁹

Criminal Extra Ordinaria ini diadopsi oleh raja-raja yang

berkuasa. Sehingga terbuka peluang yang sangat lebar untuk menerapkannya secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, timbul pemikiran harus ditentukan dalam perundang-undangan terlebih dahulu perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dipidana. Dari sini timbul batasan-batasan kepada negara untuk menerapkan hukum pidana.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).¹⁰

2. Teori Pembedanaan

Menurut M. Sholehuddin tujuan pembedanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.¹¹

E. Kerangka Konseptual

1. Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
2. Tindak Pidana adalah suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah

¹⁰ Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 22.

¹¹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 59.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm. 23.

melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (Principle of legality)

3. Penyelundupan manusia adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memiliki wilayah tersebut secara sah, baik menggunakan dokumen yang sah maupun palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi atau tidak (Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian);¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang asas-asas hukum, yaitu asas legalitas, asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* (tidak ada delik, tidak

ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tersier

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (legal research) digunakan metode kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan ini akan dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Adapun yang disebut dengan deskriptif adalah menggambarkan dan atau menguraikan secara jelas dari keadaan-keadaan yang diperoleh berdasarkan hasil studi kepustakaan. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

1. Pengertian Tindak Pidana

Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda "*strafbaar feit*", *criminal act* dalam bahasa Inggris, *actus reus* dalam Bahasa latin. Didalam menerjemahkan perkataan strafbaar fiet itu terdapat beraneka macam istilah yang dipergunakan dari

¹² Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

beberapa serjana dan juga didalam berbagai perundang-undangan. Moeljatno, Guru Besar Universitas Gajah Mada dalam pidato Dies Natalis Gajah Mada, tanggal 19 Desember 1955 dengan judul “perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, mengatakan “tidak terdapat istilah yang sama didalam menterjemahkan *strafbaar feit* di Indonesia”. Untuk *strafbaar feit* ini ada 4 (empat) istilah yang dipergunakan dalam Bahasa Indonesia, yakni:¹³

1. Peristiwa pidana (Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950.
2. Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat/boleh dihukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Semstara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Peradilan Sipil, Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Darurat Tentang Mengubah *Ordonansi Tijdelijk Bijzondere Bepalingen Strafrecht* L.N 1951 Nomor 78 dan dalam buku Mr. Karni: Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950.
3. Tindak pidana (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Kosntituante dan DPR)
4. Pelanggaran pidana dalam bukunya Mr. Tirtaamidaja: Pokok-Pokok Hukum Pidana 1955.

Mengenai macam-macam pidana terdapat di dalam Pasal 10 KUHPidana, yaitu:

- a. Pidana pokok, yang terdiri dari:
 - 1) pidana mati;
 - 2) pidana penjara;
 - 3) pidana kurungan;

- 4) pidana denda.
- b. Pidana tambahan, terdiri dari:
 - 1) pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) pengumuman putusan hakim.

Didalam tindak pidana-tindak pidana khusus diluar KUHPidana disamping macam-macam pidana yang tersebut di dalam Pasal 10 KUHPidana, dikenal pula pidana administrasi, pencabutan keuntungan tertentu dan lain sebagainya.

2. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Menurut Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini, arus lalu lintas orang semakin tinggi. Dampak yang ditimbulkan pun semakin bervariasi.

Indonesia menyingkapi hal ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian dan segala peraturan pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri yang terkait, dan para pejabat lainnya. Dalam perkembangan telah disahkan dan dinyatakan berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian terhitung mulai tanggal 5 Mei 2011.

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara

¹³Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 25.

terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

3. Perbedaan dan Persamaan Penyelundupan Manusia (People Smuggling) dengan Perdagangan Orang (Human Trafficking) Menurut Para Ahli

Tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan orang memiliki persamaan dalam aspek hukum, yaitu proses, cara dan tujuan; yang mana tiga aspek tersebut memerlukan pembuktian hukum. Perbedaan dalam istilah penyelundupan manusia secara garis besar merujuk tindakan memasukkan warga negara asing ke negara tujuan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan keimigrasian.¹⁴

Penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia

¹⁴<https://www.kompasiana.com.penyelundupan-manusia-dan-perdagangan-orang-apa-bedanya>, diakses tanggal 26 Agustus 2019.

dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).¹⁶

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.¹⁷
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk apa yang dicita-citakan.¹⁸

¹⁵Bab 1 Pasal 1 Butir 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 20.

¹⁷Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1981), hlm. 159

¹⁸Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 20.

C. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:¹⁹

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”

2. Jenis-Jenis Pidana

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:

- a. Pidana Pokok
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
- b. Pidana Tambahan
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim

3. Pidana dan Tujuan Pidana

Wijayanto dan Ridwan Zachrie menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur

atau ciri-ciri sebagai berikut:²⁰

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Menurut M. Sholehuddin tujuan pidana harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku. M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pidana tersebut, yaitu:²¹

1. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif, dalam artian bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
3. Keadilan, dalam artian bahwa pidana tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).

¹⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

²⁰ Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 840.

²¹ M. Sholehuddin, *Op.cit.*, hlm.59.

4. Pelaku dan Pertanggungjawaban Pidana

Pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif di Indonesia ada beberapa perundang-undangan yang mengatur kewajiban setiap orang, baik orang untuk orang Indonesia maupun untuk orang asing yang mau masuk ke Indonesia.

1. Untuk Warga Negara Indonesia yang mau masuk wilayah Negara Indonesia diwajibkan untuk
 - a. Memiliki Dokumen Perjalanan Indonesia yang sah dan masih berlaku;
 - b. Memiliki lembar E/D;
 - c. Pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi; dan
 - d. Melalui pemeriksaan Keimigrasian di tempat pemeriksaan Imigrasi yang ditentukan.
2. Untuk Warga Negara Asing yang mau masuk ke Wilayah Negara Indonesia mempunyai kewajiban
 - a. Memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
 - b. Memiliki visa yang masih berlaku, kecuali orang yang

tidak diwajibkan memiliki visa; dan

- c. Mengisi kartu E/D, kecuali bagi pemegang kartu elektronik.

Selain itu, setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus melalui pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi oleh petugas imigrasi. Dalam hukum positif di Indonesia hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian:

1. Bahwa keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menpukulin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Adapun analisa penulis apabila dikaitkan dengan asas legalitas yaitu pengaturan mengenai tindak pidana penyelundupan manusia dalam Undang-Undang Keimigrasian sudah diatur secara umum saja akan tetapi di dalam norma Undang-Undang keimigrasian tersebut tidak menjelaskan secara

konkrit mengenai tindak pidana penyelundupan manusia, hanya menjelaskan secara umum saja dengan mengandalkan norma pasal 113 dan 120 yang rumusan awalnya “setiap orang” padahal yang terjadi dilapangan delik “setiap orang” tersebut hanya berlaku kepada pelaku atau yang membawa manusia itu, akibat tersebut korban yang turut serta melakukan kejahatan penyelundupan manusia dapat lolos dari jeratan hukum karna doktrin asas legalitas yaitu *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). Korban lolos dari jeratan hukuman dikarenakan tidak ada delik ataupun aturan yang secara konkrit mengatur tentang tindak pidana penyelundupan yang dimana “korban” juga harus dipandang sebagai pelaku tindak pidana penyelundupan manusia karena mereka secara bersama-sama melakukan sebuah kejahatan tersebut dan bisa menjadi permufakatan jahat. Kalau di teliti lebih detail penyelundupan manusia tersebut terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku, akan tetapi korban penyelundupan tersebut selalu lolos dari delik tersebut yang seharusnya baik pelaku maupun korban juga terlibat dalam terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia.

Melihat hal tersebut seharusnya korban terkena delik penyertaan, maka dari itu penulis menggunakan analisa dari teori pembedaan sebab jika sekiranya perumusan itu dicantumkan dalam pasal tersebut, maka akan dapat ditemukan siapa pelakunya, yaitu:

a. Dalam delik formal, pelakunya ialah setiap orang yang melakukan perbuatan yang

memenuhi rumusan delik

- b. Dalam delik materil, pelakunya ialah setiap orang yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.
- c. Dalam delik yang memenuhi unsur kedudukan (kualitas), pelakunya adalah setiap orang yang memiliki unsur kedudukan (kualitas) sebagaimana dilakukan dalam delik. Sebagai contoh Misalnya, dalam delik-delik jabatan, yang dapat melakukannya adalah pegawai negeri. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa *pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana.*

Apabila kita rujuk dari teori diatas, maka rumusan *zij die het feit plgeen* itu tercantum dalam Pasal 55 KUHP, yang ditempatkan dibawah bab 5 buku 1 KUHP, tentang penyertaan dalam tindak pidana, artinya dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang, sehingga baik pelaku maupun korban harus dilihat secara bersama-sama apakah kedua belah pihak tersebut mempunyai niat dan kesepakatan dalam terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia ini.

Analisa penulis selanjutnya apabila menggunakan teori kebijakan hukum pidana mengenai pengaturan tindak pidana penyelundupan manusia dalam hukum positif Indonesia yaitu perlu adanya kebijakan kriminalisasi yang merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Karena dalam hal ini korban yang turut serta melakukan

kejahatan penyelundupan selalu lolos dari jeratan hukuman dikarenakan tidak ada aturan yang mengatur mengenai korban yang turut serta menjadi pelaku kejahatan. Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).²²

Kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, tujuan untuk mewujudkan aturan kebijakan yang baik yaitu:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.²³ Dalam hal ini seperti membuat kebijakan kriminalisasi terhadap korban yang turut serta dalam melakukan kejahatan penyelundupan.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk apa yang dicita-citakan.²⁴ Dalam hal ini bertujuan untuk menjawab keresahan masyarakat akibat selalu lolosnya pelaku kejahatan seperti penyelundupan, oleh

karenanya perlu adanya kriminalisasi.

B. Pengaturan Sanksi Pidana Yang Ideal Terhadap Korban Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Di Indonesia

Pada dasarnya pengaturan sanksi pidana keimigrasian mengenai tindak pidana penyelundupan manusia hampir sama di negara-negara asia dan terdapat beberapa kelemahan, misalnya seperti Malaysia yang menangani tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) disamakan dengan saat menangani imigran illegal biasa. Hal tersebut menjadi kelemahan Malaysia, karena penyelundupan manusia (*people smuggling*) berbeda dengan imigran illegal. Berbeda dengan Australia yang memiliki kelebihan sendiri yaitu, mempunyai satu bagian khusus dari *Migration Act* 1958 No. 62, 1958 as amended yang khusus mengatur mengenai tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*). Dan di negara kita yaitu Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan lain yang mendukung Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*). Namun tidak ada bagian khusus yang mengatur mengenai tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*).

Pengaturan ideal mengenai tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia dapat berkaca dari Australia yang memiliki kelebihan sendiri yaitu, mempunyai satu bagian khusus dari *Migration Act* 1958 No. 62 as amended yang khusus mengatur mengenai tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*). Indonesia sudah mempunyai aturan ke imigrasian namun tidak ada pasal khusus ataupun bagian khusus yang mengatur tindak

²² Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 20.

²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1981), hlm. 159

²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 20.

pidana penyelundupan manusia, tujuan diaturnya dibagian khusus tersebut adalah dikarenakan tindak pidana penyelundupan ini berbeda dengan tindak pidana keimigrasian karena mempunyai unsur delik yang luas dan definisi yang konkrit, sehingga posisi korban dalam penyelundupan tersebut dapat dilacak apakah korban tersebut secara bersama-sama melakukan kesepakatan penyelundupan manusia ataupun memang hanya pelaku yang berperan aktif dalam tindak pidana penyelundupan manusia.

Analisa penulis apabila menggunakan teori pemidanaan maka kita mengenal dalam pemidanaan tersebut terdapat teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Selain sanksi pidana denda apabila pelaku tidak mampu memenuhi sanksi pidana denda tersebut terdapat pula alternative pemidanaan yaitu dengan hukum kerja sosial atau pidana kerja sosial, pidana kerja sosial atau dalam istilah asing sering disebut sebagai *community service orders* (CSO) adalah bentuk pidana dimana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan kerja sosial yang ditentukan.²⁵

Pidana kerja sosial memang baru sebatas rencana dan belum sah ditetapkan sebagai salah satu sanksi

pidana di Indonesia, dasar hukumnya pun hanya diatur pada RUU KUHP tahun 2019. Pidana kerja sosial penting dijadikan salah satu jenis sanksi pidana di Indonesia khususnya penyelundupan manusia karena dengan beberapa alasan yakni lebih bisa memperbaiki terpidana, lebih berguna bagi terpidana dan masyarakat serta lebih memperhatikan hak asasi manusia dan menyesuaikan kemampuan terpidana bahkan memberi mereka kemampuan skill sehingga mereka mampu diterima secara sosial maupun ekonomi.

Analisa penulis menggunakan teori kebijakan hukum pidana maka dari itu usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi bahkan mengatur pengaturan ideal tentang sebuah kejahatan (politik kriminal) penyelundupan manusia tersebut sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non-penal”. Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat.²⁶

Indonesia sebagai negara hukum segala sesuatu harus berdasarkan pada hukum, yang di

²⁵ Tongat, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm.7.

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumi, 2010), hlm 158.

implementasikan kepada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai manifestasi dari hukum positif, dan dalam rangka penegakan hukum telah dibentuk berbagai lembaga peradilan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak setiap warga negara Indonesia.²⁷ Oleh karena itu perlu adanya kebijakan kriminalisasi yang merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana), agar membuat penyelundupan manusia ini dapat diatasi dengan mengkhususkan Undang-Undang tersendiri sebagai manifestasi dari hukum positif Indonesia nanti.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sudah mengatur secara umum mengenai penyelundupan manusia akan tetapi di dalam norma Undang-Undang keimigrasian tersebut tidak menjelaskan secara konkrit posisi korban sebagai pelaku dan mengenai tindak pidana penyelundupan manusia hanya menjelaskan secara umum saja dengan mengandalkan norma pasal 113 dan 120 yang rumusan awalnya “setiap orang” padahal yang terjadi dilapangan delik “setiap orang” tersebut hanya berlaku kepada pelaku atau yang membawa manusia itu, kalau di teliti lebih detail penyelundupan manusia tersebut terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku, akan tetapi korban penyelundupan tersebut selalu lolos

dari delik tersebut karena sesuai dengan asas legalitas yang dimana tiada suatu orang dapat di pidana melainkan harus ada aturan yang mengatur terlebih dahulu, yang seharusnya baik pelaku maupun korban juga terlibat dalam terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia.

- 2) Tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia sudah mempunyai aturan ke imigrasian namun tidak ada pasal khusus ataupun undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana penyelundupan manusia, tujuan diaturnya dibagian khusus tersebut adalah dikarenakan tindak pidana penyelundupan ini berbeda dengan tindak pidana keimigrasian karena mempunyai unsur delik yang luas dan definisi yang konkrit, sehingga posisi korban dalam penyelundupan tersebut dapat dilacak apakah korban tersebut secara bersama-sama melakukan kesepakatan penyelundupan manusia ataukah memang hanya pelaku yang berperan aktif dalam tindak pidana penyelundupan manusia.

Pengaturan sanksi ideal seharusnya selaras dengan tujuan pemidanaan, sanksi bisa berupa pidana kerja sosial, ini adalah pidana alternatif dari perampasan kemerdekaan jangka pendek yang dilakukan dengan berdasarkan hitungan jam tertentu dan dilakukan tanpa bayaran. Akan tetapi mereka mendapat skill yang bisa membantu mereka dalam aktifitas sosial dan ekonomi, sanksi pidana kerja sosial menjadi selaras dengan tujuan pemidanaan yang bukan hanya sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi juga sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

²⁷ Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, UR Press, Pekanbaru, 2012, hlm. 25-28.

B. Saran

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dimana walaupun tidak mengadopsi seluruh kejahatan penyelundupan manusia tetapi untuk saat ini harus dapat dijalankan secara ketat dan maksimal. Pemerintah dan Dpr sebagai pembuat Undang-Undang perlu memperhatikan dan mempertimbangkan untuk membuat aturan khusus tentang kejahatan penyelundupan manusia ini karena kejahatan tersebut bersifat luas. Selain itu Pemerintah perlu membuka lapangan pekerjaan dengan menyelaraskan pemidanaan berbasis kerja sosial sehingga terpidana tersebut siap secara kemampuan untuk memulihkan sosial dan ekonomi yang itu bisa membantu pemerinta dalam mengurangi tingkat kejahatan. Kemudian, Indonesia memiliki hak untuk memilih orang-orang yang dapat masuk ke Indonesia sehingga Indonesia tidak dirugikan dengan keberadaan orang asing. Pemerintah harus tegas terhadap arus orang asing yang masuk dan keluar Indonesia tanpa mengesampingkan rasa kemanusiaan, karena hal tersebut juga demi keutuhan dan kedaulatan negara.
- 2) Terhadap tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia perlu adanya aturan khusus tentang tindak pidana penyelundupan manusia, Indonesia harus mempunyai pasal, bab, atau undang-undang khusus yang mengatur secara konkrit mengenai tindak pidana penyelundupan manusia ini dikarenakan posisi korban dalam hal tersebut tidak serta merta dipandang sebagai korban saja tetapi juga dilihat apakah terjadi kesepakatan antara

korban dan pelaku kejahatan dalam terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia.

Kemudian, penerapan sanksi pidana kerja sosial, yaitu pidana alternatif dari perampasan kemerdekaan jangka pendek yang dilakukan dengan berdasarkan hitungan jam tertentu dan dilakukan tanpa bayaran. Akan tetapi mereka mendapat skill yang bisa membantu mereka dalam aktifitas sosial dan ekonomi, sanksi pidana kerja sosial menjadi selaras dengan tujuan pemidanaan yang bukan hanya sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi juga sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, R., *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Darji, Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995
- Ediwarman, 2018, *Monograf Sejarah Hukum*, Medan.

- Friedman, W. *Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kartanegara, Satochid, 1983, *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Saleh, Roeslan, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Utsman, Sabian, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Wibowo, Eddi, dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004

B. Jurnal Hukum

- Erdiansyah, Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Riau, Vol. 1 No. 1, Agustus 2010

- Kadarudin, 2013, "People Smuggling dalam Perspektif Hukum Internasional dan Penegakan Hukumnya di Indonesia", *Jurnal Perpustakaan, Informasi, dan Komputer "Jupiter"* Volume XII Nomor 2 Edisi Juni.
- Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York: Columbia University Press, 1978, hlm. 9-11, *Westlaw*.
- Seidman, 2005, *Corporate Accountability and the Privatization of Labor Standards: Struggles over Codes of Conduct in the Apparel Industry*, *Jurnal Westlaw*, Vol. 1 No.12, diakses pada tanggal 8 Oktober 2019.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216
- Peraturan Australia Migration Act 1958 No. 62, 1958 as amended mengatur mengenai tindak pidana penyelundupan manusia (people smuggling)